

RIKUN DAN I  
 PERATURAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN INDONESIA  
 NOMOR 202 /TAL.01/2012  
 TENTANG  
 PEDOMAN TENCER DAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2012

### ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

(dalam Ruciah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Sumatera Utara	19.350.721.000
2	Provinsi Riau	18.062.198.000
3	Provinsi Kepulauan Riau	20.261.653.000
4	Provinsi Lampung	2.000.000.000
5	Provinsi DKI Jakarta	2.000.000.000
6	Provinsi Jawa Tengah	21.826.131.000
7	Provinsi DI Yogyakarta	23.968.142.000
8	Provinsi Jawa Timur	27.301.155.000
9	Provinsi Sulawesi Selatan	2.000.000.000
10	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.000.000.000
11	Kota Banda Aceh	33.478.767.000
12	Kab. Nagan Raya	2.000.000.000
13	Kab. Taparuli Utara	26.930.091.000
14	Kota Medan	36.792.797.000
15	Kota Sibolga	2.000.000.000
16	Kab. Sirk	2.000.000.000
17	Kab. Ogan Komering Ilir	2.000.000.000
18	Kota Palembang	32.553.403.000
19	Kota Lubuk Linggau	2.000.000.000
20	Kab. Banyuasin	2.000.000.000
21	Kab. Bangka	28.353.598.000
22	Kab. Bangka Tengah	2.000.000.000
23	Kab. Kaur	2.000.000.000
24	Kab. Mukomuko	2.000.000.000
25	Kab. Lampung Barat	28.186.303.000
26	Kab. Lampung Selatan	2.000.000.000
27	Kota Bandar Lampung	27.930.145.000
28	Kota Metro	2.000.000.000
29	Kab. Tulang Bawang Barat	2.000.000.000
30	Kota Depok	2.000.000.000

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
31	Kab. Serang	31.885.637.000
32	Kab. Tangerang	28.921.904.000
33	Kota Cilegon	28.424.490.000
34	Kota Tangerang	34.422.901.000
35	Kota Serang	28.744.488.000
36	Kota Tangerang Selatan	34.213.477.000
37	Kab. Banyumas	2.000.000.000
38	Kab. Boyolali	2.000.000.000
39	Kab. Cilacap	24.693.637.000
40	Kab. Jepara	2.000.000.000
41	Kab. Kebumen	2.000.000.000
42	Kota Surakarta	32.955.109.000
43	Kota Tegal	2.000.000.000
44	Kab. Sleman	32.095.325.000
45	Kota Yogyakarta	30.422.296.000
46	Kab. Bangkalan	2.000.000.000
47	Kab. Bondowoso	31.364.539.000
48	Kab. Gresik	27.010.988.000
49	Kab. Lamongan	28.712.194.000
50	Kab. Pacitan	2.000.000.000
51	Kab. Probolinggo	25.767.431.000
52	Kab. Tuban	2.000.000.000
53	Kab. Tuhungagung	28.763.620.000
54	Kota Madiun	30.239.200.000
55	Kota Malang	35.795.120.000
56	Kota Mojokerto	2.000.000.000
57	Kota Pontianak	33.572.708.000
58	Kab. Kotawaringin Timur	25.480.253.000
59	Kab. Berau	29.051.497.000
60	Kab. Paser	25.689.638.000

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
61	Kota Tarakan	27.354.761.000
62	Kota Bitung	33.602.094.000
63	Kab. Gorontalo	26.605.808.000
64	Kab. Bone Bolango	25.953.895.000
65	Kab. Donggala	28.058.041.000
66	Kota Palu	28.460.512.000
67	Kab. Gowa	2.000.000.000
68	Kab. Maros	28.643.116.000
69	Kota Makassar	24.953.585.000
70	Kab. Bantaen	26.068.522.000
71	Kab. Selayar	30.957.317.000
72	Kota Bau-bau	25.253.076.000
73	Kab. Badung	28.958.182.000
74	Kab. Gianyar	25.669.534.000
<b>Total Provinsi</b>		<b>138.780.000.000</b>
<b>Total Kab/ Kota</b>		<b>1.249.020.000.000</b>
<b>Total Nasional</b>		<b>1.387.800.000.000</b>

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 202/PMK.07/2012  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor: .....

Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ..... menyatakan telah mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau akan mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan pertanggungjawaban penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai syarat penyaluran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Gubernur/Bupati/Walikota  
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....

(cap dan tanda tangan)  
(materai Rp6000,-)

Nama .....

\*) Coret yang tidak perlu

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 202/PMK.07/2012  
 TENTANG  
 PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2012

**RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JENIS BELANJA	RUPIAH	TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
dst...					
Total					

**Keterangan :**

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.  
 Kolom 2 : diisi dengan program sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013.  
 Kolom 3 : diisi dengan kegiatan yang direncanakan.  
 Kolom 4 : diisi dengan belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, belanja bantuan keuangan, atau belanja hibah.  
 Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah dari masing-masing belanja.  
 Kolom 6 : diisi dengan target dan indikator capaian program yang terkait dengan kegiatan, misal : persentase Angka Partisipasi Kasar, persentase ruang kelas yang memenuhi standar, dst.

Gubernur/Bupati/Walikota  
 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....

(cap dan tanda tangan)

Nama .....

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO